

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang mencakup daerah provinsi, kabupaten dan kota (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Penggunaan khusus kata pemerintah ini mengacu secara khusus pada tingkat administrasi yang terletak secara geografis dan memiliki kekuasaan yang terbatas (Chang & Andreoni, 2016). Pemerintah daerah, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan di wilayah-wilayah tertentu, dengan kewenangan tertentu.

Tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi atas kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan menjadi isu yang sangat penting saat ini terutama di organisasi pemerintahan daerah (Adil, 2022). Pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah yang baik akan memudahkan daerah dalam memetakan dan mengalokasikan prioritas pembangunan daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat meningkat secara signifikan.

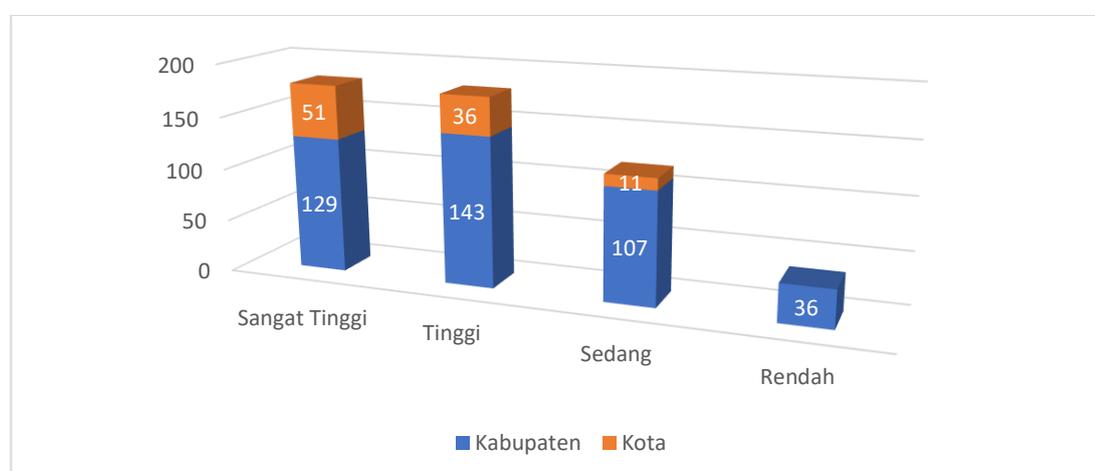
Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan, khususnya di sektor pemerintahan. Transformasi digital khususnya melalui aplikasi *e-government* menjadi kunci utama peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Menurut Tapscott (1996), dalam buku *Digital Economy*, TI telah mengubah cara organisasi beroperasi, mengelola informasi, dan melayani masyarakat.

Teknologi digital menawarkan peluang baru untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pandangan Heeks (2001) bahwa *e-government* adalah penggunaan

teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta meningkatkan efisiensi internal pemerintah. Inovasi digital sangat penting untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien dan responsif. Menurut Christensen dkk (2006), inovasi digital di sektor publik harus fokus pada penciptaan nilai tambah bagi masyarakat, efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan. Hal ini didukung oleh pendapat West & Wimmer (2008) yang berpendapat bahwa inovasi di bidang *e-government* dapat mengoptimalkan proses internal pemerintahan dan meningkatkan kualitas interaksi dengan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi tertentu.

Pentingnya peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk memenuhi harapan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Beberapa indikator kinerja Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan publik diantaranya Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik, nilai implementasi *e-government*/ Indeks SPBE dan Indek Inovasi Daerah serta beberapa indikator lainnya.

Data yang dirilis oleh Ombudsman RI tentang hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2023 dapat dilihat grafik berikut:

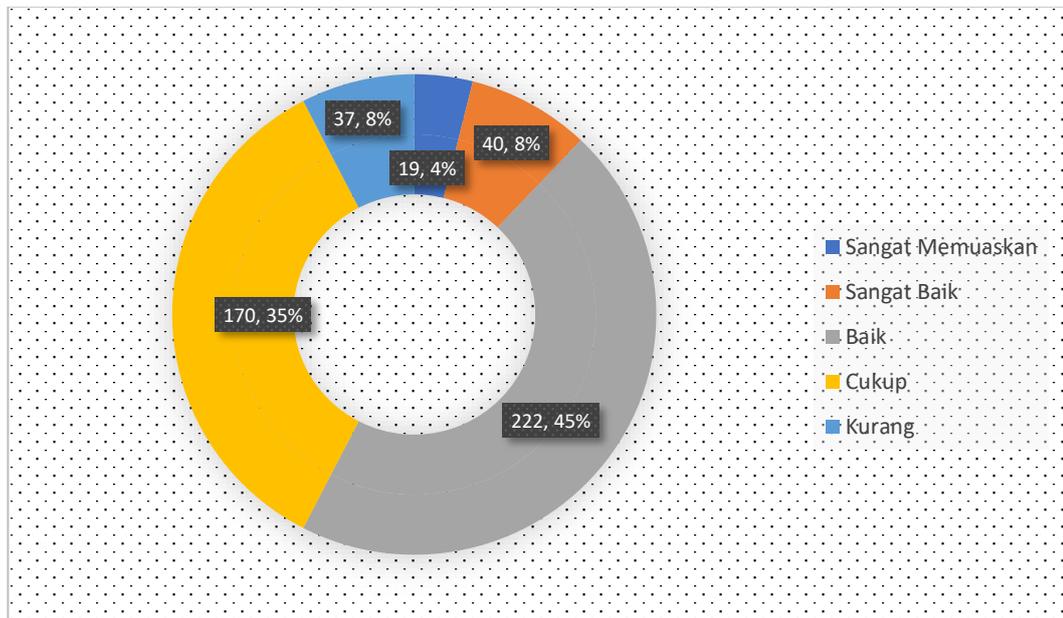


Sumber: Ombudsman (2023)

**Gambar 1.1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2023**

Pada Gambar 1.1. di atas, pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah memperoleh penilaian dengan kualitas sangat tinggi hanya berjumlah 180 Pemerintah Daerah (35,1%), kualitas tinggi 179 pemerintah daerah (34,9%), kualitas sedang 118 pemerintah daerah (23,0%) dan sisanya sebanyak 36 pemerintah daerah (7,0%) berada pada kualitas rendah. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pemerintah daerah kabupaten/kota (70%) kualitas pelayanan publiknya sudah baik yaitu masuk kategori kualitas tinggi dan kualitas sangat tinggi, namun masih cukup banyak yang masih berkualitas sedang dan rendah (30%), dalam arti masih terdapat pelayanan publik yang masih dibawah standar.

Penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilihat dari capaian hasil pemantauan dan evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk capaian hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sebagai berikut:



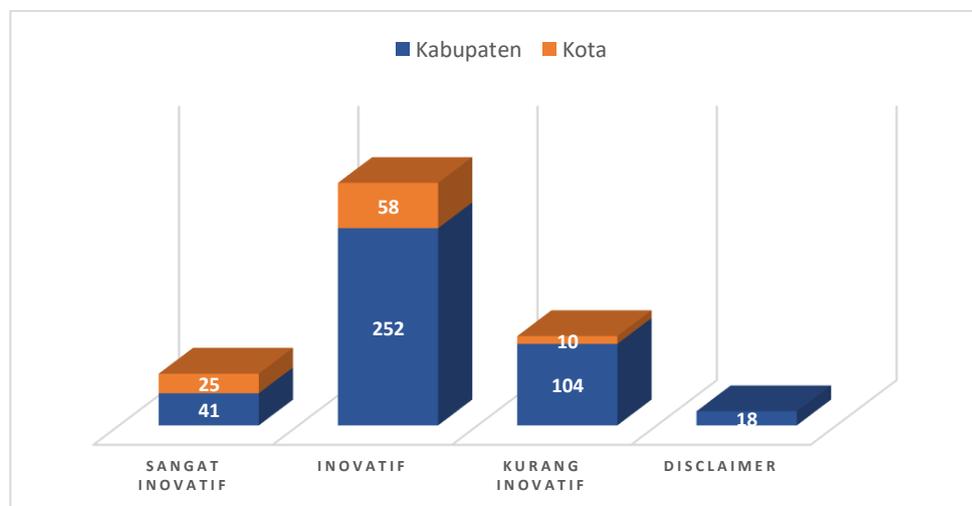
Sumber: Kemenpan-RB (2023)

**Gambar 1.2. Nilai Implementasi e-Gov/Indeks SPBE Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2023**

Gambar 1.2. di atas menunjukkan bahwa capaian nilai implementasi *e-government*/Indeks SPBE pemerintah daerah kabupaten/kota terbagi dalam

kategori memuaskan sebanyak 19 pemerintah daerah (4%), sangat baik sebanyak 40 pemerintah daerah (8%), kategori baik 222 pemerintah daerah (45%), 170 pemerintah daerah (35%) kategori cukup dan 37 pemerintah daerah (8%) kategori kurang. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja implementasi *e-government*/indeks SPBE pemerintah daerah kabupaten/kota sudah baik (57%) yang ditunjukkan dengan kategori memuaskan, sangat baik dan baik, akan tetapi sisanya masih cukup banyak daerah yang dalam kategori cukup bahkan kurang dalam kinerja, hal ini menunjukkan bahwa sebagian kinerja implementasi *e-government* daerah kabupaten/kota masih kurang baik (43%)

Kinerja selanjutnya yang sering digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah adalah Indeks Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih sedikit pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori Sangat Inovatif yaitu sebanyak 66 pemerintah daerah (13,0%), kategori Inovatif yaitu sebanyak 310 pemerintah daerah (61,0%) dan kategori Kurang Inovatif sebanyak 114 Pemerintah Daerah (22,4%) dan 18 pemerintah daerah (3,5%) masuk kategori *disclaimer*. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja inovasi daerah sebagian besar (74%) daerah kabupaten/kota sudah baik dan sisanya (26%) masih kurang baik. Rincian capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.3. di bawah ini.



**Gambar 1.3. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2023**

Beberapa fenomena tersebut mengarah pada berbagai masalah yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu kinerja pemerintahan daerah itu sendiri. Fenomena itu memperlihatkan bahwa:

1. Kinerja pemerintahan daerah pada umumnya sudah berkategori baik bahkan sangat baik, tetapi masih ada sebagian pemerintah daerah yang kinerjanya cukup bahkan kurang
2. Mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan daerah dinilai masih belum optimal karena belum memenuhi standar kualitas tinggi bahkan sangat tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berdampak terhadap kinerja dan citra pemerintah daerah itu sendiri.
3. Implementasi *e-government*/SPBE di lingkungan pemerintah daerah juga pada umumnya sudah baik atau efektif, tetapi masih banyak yang belum baik yakni masih pada kategori cukup bahkan kurang.
4. Inovasi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah sebagian besar sudah baik atau efektif, namun cenderung “stagnan” dan kurang memperhatikan potensi sesungguhnya yang dimiliki masing-masing daerah.
5. Selain itu faktor kepemimpinan di daerah masih menjadi belum mampu menemukan jati diri dalam menerapkan kepemimpinan transformasional yang dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal, sehingga belum berdampak pada hasil kinerja daerah yang lebih baik
6. Lingkungan digital yang berkembang pesat juga belum sepenuhnya berdampak pada berbagai perubahan lingkungan pemerintah daerah.

Permasalahan pada penelitian ini terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan memperhatikan mutu pelayanan publik, implementasi *e-government* dan strategi inovasi. Semua itu pada gilirannya perlu didukung oleh terlaksananya kepemimpinan transformasional dinamis dan lingkungan digital dinamis.

Kinerja pemerintah daerah akan tercapai melalui optimalisasi mutu pelayanan publik (*public service quality*) yang memang menjadi hak masyarakat umum (Ristian, 2020). Mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait erat dengan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah

daerah dalam hal ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan berbagai layanan publik kepada masyarakat, yang dapat mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, utilitas publik (seperti air dan listrik), penegakan hukum, transportasi umum, pengelolaan lingkungan dan sampah, dan keselamatan publik. Namun, pada kenyataannya, mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dipersepsi masih rendah yang dapat berpengaruh terhadap kinerja dan citra pemerintah daerah yang buruk (Mulyawan & Mariana, 2016). Masyarakat menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan aparat, yang disebabkan oleh masih rendahnya mutu modal manusia (*human capital*) saat ini yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat, yang diperburuk oleh belum memadainya fasilitas infrastruktur (Maqin, 2014). Meskipun begitu, pemerintah daerah dan jajarannya di wilayah Jawa Barat terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat Jawa Barat (Supriatna, 2020; Wijaya & Aprilia, 2020).

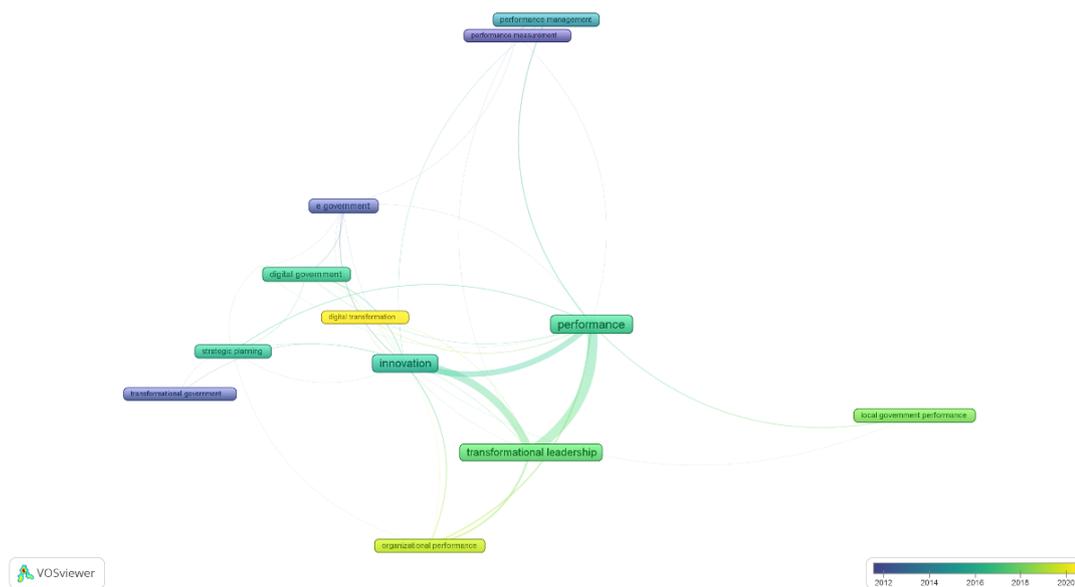
Peningkatan kinerja pemerintah daerah, optimalisasi mutu pelayanan publik, dan implementasi *e-government* ini tidak terlepas dari strategi inovasi digital (*digital innovation strategy*) yang selama ini dirumuskan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Strategi inovasi digital memainkan peran penting dalam penciptaan layanan dan produk mulai dari perencanaan dari suatu bisnis, perusahaan, dan organisasi untuk meningkatkan penyampaian produk dan layanannya (Dieffenbacher, 2022). Pada dasarnya, strategi inovasi digital diperlukan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atau *competitive advantage* suatu organisasi. Lembaga pemerintah daerah saat ini perlu terlibat dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi inovasi digitalnya sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal.

Keterlaksanaan dari strategi inovasi digital yang dapat mendorong implementasi *e-government*, optimalisasi mutu pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah itu bergantung juga pada adanya faktor kepemimpinan, terutama kepemimpinan transformasional dinamis untuk mengimbangi keterlaksanaan dan pencapaian tujuannya di lingkungan pemerintah daerah (Azhar & Yang, 2021; H. Kim & Kim, 2015; Mickson & Anlesinya, 2019). Selain itu,

berbagai perubahan di lingkungan eksternal dan internal lembaga pemerintah daerah perlu terus diperhatikan agar pimpinan dan staf pemerintah daerah dapat merumuskan dan mengimplementasikan strategi inovasi digital, *e-government*, dan optimalisasi mutu pelayanan publik untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Perubahan lingkungan eksternal dan internal yang saat ini perlu diperhatikan adalah lingkungan digital dinamis atau *dynamic digital environment* (Luna-Reyes et al., 2020; Rodrigues & Franco, 2021; Rybnikova et al., 2022).

Keterkaitan antara istilah dan kata kunci "*performance*" dan "*local government*" sudah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Dengan mengacu pada analisis pencarian di berbagai jurnal bereputasi dinyatakan bahwa sejak tahun 1976 sampai 2023 sudah banyak penelitian yang mengkaji "*local government performance*". Hasil penelusuran lainnya ditemukan sebanyak 986 artikel ilmiah (yang terdiri atas artikel jurnal, buku, dokumen, tesis, dan disertasi) yang judul, abstrak, dan dokumennya mengandung kata-kata kunci tersebut (diolah tanggal 12-01-2023).

Pencarian kata kunci "*local government performance*", "*public service quality*" "*e-government*" menghasilkan 777 artikel, yang sebanyak 98 di antaranya mengkaji kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Namun demikian, jika ditambahkan dengan kata kunci "*digital innovation strategy*", hanya terdapat 301 artikel yang secara memuat ketiga kata kunci tersebut. Dari semua itu, baru 26 penelitian yang secara khusus memasukkan aspek "*transformational leadership*" dan "*digital environment*" dalam "*local government performance*".



**Gambar 1.4. Hasil Analisis Vosviewer untuk kata kunci “*local government performance*”, “*public service*”, “*e-government*”, “*digital innovation strategy*”, “*transformational leadership*”, dan “*digital environment*” 2012-2022**

Selain itu, dilakukan juga analisis bibliometrik dengan aplikasi Vosviewer terhadap artikel jurnal sejak 2012 sampai 2022, yang menunjukkan bahwa kata kunci kinerja (*performance*), mutu pelayanan publik (*public service quality*), inovasi (*innovation*) dan kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*) itu memiliki terkait yang sangat erat satu sama lain, sedangkan keterkaitannya dengan kinerja pemerintah daerah (*local government performance*), *e-government*, dan lingkungan digital (*digital environment*) tidak terlalu banyak (lihat Gambar 1.4).

Mengacu pada analisis bibliometrik tersebut (dengan aplikasi Perish & Publish, Google Scholar, dan Vosviewer), dapat ditemukan **research gap** dalam penelitian ini yaitu bahwa sampai 2022, penelitian yang mengkaji kinerja pemerintah daerah dalam kaitannya dengan mutu pelayanan publik, implementasi *e-government*, strategi inovasi digital, kepemimpinan transformasional, dan lingkungan digital itu belum banyak dilakukan, apalagi di Indonesia. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, peneliti mencoba membangun model strategi inovasi digital, implementasi *e-government*, dan mutu pelayanan publik untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan memperhatikan faktor lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis, sehingga didapatkan

suatu model turunan manajemen strategis yang komprehensif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah di pulau jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur).

Peneliti juga mengidentifikasi beberapa *empirical gap* bahwa belum ada penelitian-penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji semua variabel, yaitu kinerja pemerintah daerah (*local government performance*), mutu pelayanan publik (*public service quality*), implementasi *e-government*, strategi inovasi digital (*digital innovation strategy*), kepemimpinan transformasional dinamis (*dynamic transformational leadership*), lingkungan digital dinamis (*dynamic digital environment*). Hampir semua penelitian sebelumnya tersebut hanya mengkaji satu atau dua variabel tersebut dengan *local government performance*, tidak melibatkan semua variabel seperti yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tersebut dengan *novelty* menjadikan masuknya variabel strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik yang diperkuat oleh adanya lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis. Diperhatikan pula bahwa tidak ada satu pun penelitian sebelumnya yang dilaksanakan di wilayah Pulau Jawa khususnya di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan empiris tersebut.

Dilihat dari *theoretical gap*, penelitian ini mencoba mengungkapkan beberapa teori yang secara umum melandasi teori-teori kinerja secara umum maupun dalam teori-teori strategi inovasi digital, implementasi *e-government*, dan mutu pelayanan publik, dilengkapi dengan teori-teori lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis, dengan dimensi dan indikator yang unik dan khusus untuk kajian *local government* disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Selama ini, beberapa teori yang sering digunakan dalam mengkaji kinerja pemerintah daerah adalah *balanced scorecard*, sementara itu dalam penelitian ini lebih mengacu pada *performance management* (Almatrooshi et al., 2016; De Waal, 2017). Peneliti berupaya melengkapi teori-teori tersebut dengan teori *Dynamic Capability* (Chowdhury & Quaddus, 2017; Teece, 2018) serta teori terkait dengan *Organizational Behavior and Governance* (Ansell & Torfing, 2022;

Griffin et al., 2016). Dengan begitu, kesenjangan teori ini dapat dijumpai sehingga diharapkan dapat memperkaya berbagai teori yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan *research gap*, *empirical gap*, dan *theoretical gap* yang ada, penelitian ini mencoba untuk menjembatani gap-gap tersebut dengan mengkaji kinerja pemerintah daerah (*local government performance*) dengan penekanan pada mutu pelayanan publik (*public service quality*), implementasi *e-government* (*e-government implementation*), strategi inovasi digital (*digital innovation strategy*), kepemimpinan transformasional dinamis (*dynamic transformational leadership*), dan lingkungan digital dinamis (*dynamic digital environment*), khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di pulau Jawa terutama pada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kinerja pemerintah daerah, mutu pelayanan publik, implementasi *e-government*, strategi inovasi digital, kepemimpinan transformasional dinamis, dan lingkungan digital dinamis pada pemerintah daerah?
2. Sejauh mana pengaruh lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Sejauh mana pengaruh lingkungan digital dinamis terhadap strategi inovasi digital yang dimediasi oleh kepemimpinan transformasional dinamis pada pemerintah daerah?
4. Sejauh mana pengaruh lingkungan digital dinamis terhadap implementasi *e-government* yang dimediasi oleh kepemimpinan transformasional dinamis dan strategi inovasi digital pada pemerintah daerah?
5. Sejauh mana pengaruh lingkungan digital dinamis terhadap mutu pelayanan publik yang dimediasi oleh kepemimpinan transformasional dinamis, strategi inovasi digital dan implementasi *e-government* pada pemerintah daerah?

6. Sejauh mana pengaruh lingkungan digital dinamis terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh kepemimpinan transformasional dinamis, strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik pada pemerintah daerah?
7. Sejauh mana pengaruh kepemimpinan transformasional dinamis terhadap implementasi *e-government* yang dimediasi oleh strategi inovasi digital pada pemerintah daerah?
8. Sejauh mana pengaruh kepemimpinan transformasional dinamis terhadap mutu pelayanan publik yang dimediasi oleh strategi inovasi digital dan implementasi *e-government* pada pemerintah daerah?
9. Sejauh mana pengaruh kepemimpinan transformasional dinamis terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik pada pemerintah daerah?
10. Sejauh mana pengaruh strategi inovasi digital terhadap mutu pelayanan publik yang dimediasi oleh implementasi *e-government* pada pemerintah daerah?
11. Sejauh mana pengaruh strategi inovasi digital terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik pada pemerintah daerah?
12. Sejauh mana pengaruh implementasi *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh mutu pelayanan publik pada pemerintah daerah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi kinerja pemerintah daerah, mutu pelayanan publik, implementasi *e-government*, strategi inovasi digital, kepemimpinan transformasional dinamis, dan lingkungan digital dinamis pada pemerintah daerah.

2. Menganalisis pengaruh lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Menganalisis pengaruh lingkungan digital dinamis terhadap strategi inovasi digital yang dimediasi oleh kepemimpinan transformasional dinamis pada pemerintah daerah.
4. Menganalisis pengaruh lingkungan digital dinamis terhadap implementasi *e-government* yang dimediasi oleh kepemimpinan transformasional dinamis dan strategi inovasi digital pada pemerintah daerah.
5. Menganalisis pengaruh lingkungan digital dinamis terhadap mutu pelayanan publik yang dimediasi oleh kepemimpinan transformasional dinamis, strategi inovasi digital dan implementasi *e-government* pada pemerintah daerah.
6. Menganalisis pengaruh lingkungan digital dinamis terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh kepemimpinan transformasional dinamis, strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik pada pemerintah daerah.
7. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dinamis terhadap implementasi *e-government* yang dimediasi oleh strategi inovasi digital pada pemerintah daerah.
8. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dinamis terhadap mutu pelayanan publik yang dimediasi oleh strategi inovasi digital dan implementasi *e-government* pada pemerintah daerah.
9. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dinamis terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh strategi inovasi digital, implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik pada pemerintah daerah.
10. Menganalisis pengaruh strategi inovasi digital terhadap mutu pelayanan publik yang dimediasi oleh implementasi *e-government* pada pemerintah daerah.
11. Menganalisis pengaruh strategi inovasi digital terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh implementasi *e-government* dan mutu pelayanan publik pada pemerintah daerah.

12. Menganalisis pengaruh implementasi *e-government* terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh mutu pelayanan publik pada pemerintah daerah.

#### 1.4. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, meliputi:
  - a. Menambah khasanah keilmuan manajemen pada bidang manajemen strategis, khususnya pengembangan teori yang terkait dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah berbasis inovasi digital. Penelitian ini menemukan beberapa hasil yang berbeda dari beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, pengaruh lingkungan digital dinamis secara langsung terhadap mutu pelayanan publik tidaklah signifikan, tetapi dapat berpengaruh jika melalui mediasi strategi inovasi digital. Demikian pula, ditemukan bahwa lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan digital dinamis tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi harus melalui variabel mediasi, yaitu strategi inovasi digital, implementasi *e-government*, maupun mutu pelayanan publik secara paralel ataupun serial.
  - b. Bagi penelitian di kajian manajemen stratejik, secara khusus pada sudut pandang model strategi inovasi digital, implementasi *e-government*, dan mutu pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis.
2. Manfaat Praktis, meliputi:
  - a. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dengan menggunakan model strategi inovasi digital, implementasi *e-government*, dan mutu pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan digital dinamis dan kepemimpinan transformasional dinamis.

- b. Model yang didapatkan ini selanjutnya dapat dikembangkan juga pada kebijakan atau program lainnya secara berkelanjutan

### **1.5. Struktur Organisasi Disertasi**

- Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi disertasi
- Bab II. Kajian Pustaka, memuat konsep, teori, hukum, model, dan rumus beserta turunannya, juga menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi dasar pengetahuan yang digunakan dalam penelitian
- Bab III. Metode Penelitian, menyajikan rancangan alur penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sesuai dengan prosedur dan metode penelitian yang berlaku.
- Bab IV. Temuan dan Pembahasan, menyajikan tentang temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
- Bab V. Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan penelitian, serta mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan